

INFO BPK

INDEPENDENSI INTEGRITAS PROFESIONALISME

EDISI VI/2016

UTAMA

BPK MEMBERIKAN OPINI WDP TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT



BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015. Dalam pemeriksaan LKPP tersebut BPK menemukan enam permasalahan yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP. Hal tersebut disampaikan Ketua BPK, Harry Azhar Azis pada penyerahan LHP atas LKPP Tahun 2015 kepada Ketua DPR RI, Ade Komaruddin. Penyerahan LHP tersebut dilaksanakan pada Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (2/6), di Jakarta.

Permasalahan pertama, ungkap Ketua BPK, PT. PLN

(Persero) mengubah kebijakan akuntansinya dalam laporan keuangan menjadi tidak menerapkan ISAK 8. "Dampak penerapan kebijakan ini menimbulkan perbedaan nilai Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT. PLN (Persero) per 31 Desember 2015 *unaudited* yang disajikan sebesar Rp43,44 triliun," tegasnya.

Selanjutnya, permasalahan kedua yaitu Harga Jual Eceran Minyak Solar Bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah lebih tinggi dari Harga Dasar termasuk Pajak dikurangi Subsidi Tetap sehingga membebani

konsumen dan menguntungkan badan usaha sebesar Rp3,19 triliun.

Ketiga, Piutang Bukan Pajak pada Kejaksaan RI sebesar Rp1,82 triliun dari uang pengganti perkara tipikor dan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp33,94 miliar dan USD206,87 juta dari Iuran Tetap, Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang tidak didukung dokumen yang memadai serta sebesar Rp101,34 miliar tidak sesuai hasil konfirmasi kepada wajib bayar.

Permasalahan keempat, lanjut Ketua BPK, yaitu persediaan pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp2,49 triliun belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi dan rekonsiliasi BMN serta persediaan untuk diserahkan ke masyarakat pada Kementerian Pertanian sebesar Rp2,33 triliun belum dapat dijelaskan status penyerahannya.

Selanjutnya, yang kelima adalah pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak akurat, sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajaran transaksi dan/atau saldo atas SAL sebesar Rp6,60 triliun dan yang menjadi permasalahan terakhir yaitu koreksi langsung mengurangi ekuitas sebesar Rp96,53 triliun dan transaksi antar entitas sebesar Rp53,34 triliun tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen yang memadai.

Diakhir sambutan, Ketua BPK yang didampingi oleh Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari dan para Anggota BPK berharap DPR RI dapat membantu tindak lanjut LHP LKPP oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama dan kualitas LKPP dapat ditingkatkan.

Selain menyerahkan ke DPR RI, pada hari yang sama Ketua BPK menyerahkan LHP LKPP kepada DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Komplek DPR/MPR.

DARI REDAKSI

Salam hangat dari redaksi Buletin Info BPK RI kepada seluruh pembaca.

Edisi kali ini akan membahas mengenai pemberian opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam pemeriksaan LKPP tersebut, BPK menemukan enam permasalahan yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP.

Pada hari Selasa, 31 Mei 2016, BPK menyelenggarakan Forum Diskusi mengenai peningkatan sinergi antara BPK, Lembaga Peradilan, dan APH di Pusdiklat BPK RI, Jakarta. Forum yang bertujuan untuk menghasilkan keselarasan antara BPK dan pemangku kepentingan mengenai lembaga yang berwenang melakukan perhitungan kerugian negara/daerah ini turut dihadiri oleh Ketua BPK periode 2009-2014 Hadi Poernomo, Anggota III BPK, Eddy Mulyadi Soepardi, para pejabat di lingkungan BPK, serta peserta yang mewakili lembaga peradilan, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Pada saat yang bersamaan, di Kantor Pusat BPK RI digelar Koordinasi Ketenagalistrikan, yang membahas mengenai Program Listrik 35.000 MW dan Transmisi 46.000 KM. Turut hadir sebagai narasumber Anggota IV BPK, Rizal Djailil, Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, dan Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi serta dari eksternal BPK, Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, Civitas Akademika ITB, Pekik Argo Dahono.

Pelantikan Staf Ahli BPK Bidang Keuangan Pemerintah Daerah oleh Ketua BPK RI, pelaksanaan RAT Koperasi Pegawai BPK tahun 2016, penyerahan LHP kepada 19 K/L di lingkungan AKN I, dan Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 juga turut mewarnai rubrik Buletin Info edisi kali ini.

Selamat membaca dan berkarya!

DAFTAR ISI

- DARI REDAKSI
- BPK MEMBERIKAN OPINI WDP TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
- BPK SELenggarakan FORUM DISKUSI PENINGKATAN SINERGI ANTARA BPK, LEMBAGA PERADILAN, DAN APH
- GELAR KOORDINASI KETENAGALISTRIKAN, BPK BAHAS PROGRAM LISTRIK 35.000 MW DAN TRANSMISI 46.000 KM
- KETUA BPK LANTIK STAF AHLI BPK BIDANG KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
- RAT KOPERASI PEGAWAI BPK 2016
- GALERI FOTO
- KABAR SELINTAS
- LINTAS PERWAKILAN
- KOLOM
- CASCISCUS
- KOREK PERS

PERISTIWA

BPK SELENGGARAKAN FORUM DISKUSI PENINGKATAN SINERGI ANTARA BPK, LEMBAGA PERADILAN, DAN APH



dan pemahaman antara BPK dengan pemangku kepentingan mengenai lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian negara/daerah.

Ketua BPK, Harry Azhar Azis mengatakan, BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara sering dihadapkan adanya perlawanan berupa gugatan hukum baik secara perdata maupun tata usaha negara. Selain itu terdapat pula permohonan uji materi atas undang-undang yang memperlakukan yang menggugat kewenangan dalam undang-undang BPK.

“Gugatan atas laporan pemeriksaan BPK menunjukkan belum dipahaminya tugas dan fungsi BPK dalam melakukan pemeriksaan,” ungkap Ketua BPK dihadapan peserta Forum yang mengusung tema “Peningkatan Sinergi BPK, Lembaga Peradilan, dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”.

Dalam perkembangannya, lanjut Ketua BPK, gugatan tidak saja terhadap BPK, namun juga terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK. Hal tersebut dapat menghambat tindak lanjut oleh K/L, Pemprov, Pemkab dan Pemkot atas hasil pemeriksaan BPK, sehingga kontra produktif terhadap peningkatan pengelolaan keuangan negara.

Selain membahas permasalahan kewenangan tersebut, forum ini juga bertujuan menghasilkan keselarasan antara BPK dan pemangku kepentingan mengenai substansi kebenaran hasil pemeriksaan dalam LHP BPK yang bukan merupakan obyek yang dapat diuji di muka peradilan.

Turut hadir dalam forum ini, Ketua BPK periode 2009–2014 Hadi Poernomo, Anggota III BPK, Eddy Mulyadi Soepardi, para pejabat di lingkungan BPK, serta peserta yang mewakili lembaga peradilan, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Kegiatan yang dilaksanakan pada, Selasa (31/5) di Auditorium Pusdiklat BPK, Jakarta tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK. Tujuan dari forum ini adalah untuk menghasilkan keselarasan pandangan

fungsi BPK dalam melakukan pemeriksaan,” ungkap Ketua BPK dihadapan peserta Forum yang mengusung tema “Peningkatan Sinergi BPK, Lembaga Peradilan, dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Bersih

BERITA FOTO



Kultum

Para Anggota BPK, Pejabat di lingkungan BPK, Ikistra BPK, Dharmawanita Persatuan Setjen BPK serta pegawai di lingkungan BPK RI mendengarkan kultum dalam kegiatan buka bersama di Masjid Baitul Hasib pada 10 Juni 2016.

» REDAKSI

:: R. Yudi Ramdan Budiman, Adelina Silalahi, Sri Haryati, Reza Hadi Satria, Siti Hasnawati, Waskito Tri Endroputro, Joko Indra Irawan, Ferdian Ade Irwanto, Utari Hasanah, Enda Nurhenti :: Alamat Redaksi: Jl. Gatot Subroto No. 31 :: Jakarta Pusat 10210 :: Telepon: 021 - 25549000 ext. 1184 dan 1188 :: Fax: 021 - 57953198 ::

:: Redaksi menerima kiriman berita/ informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan ke-BPK-an lainnya ::

GELAR KOORDINASI KETENAGALISTRIKAN, BPK BAHAS PROGRAM LISTRIK 35.000 MW DAN TRANSMISI 46.000 KM



Dalam pemeriksaan atas "Penyelesaian Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan Eks Dana APBN TA 2011 sampai dengan 2014 yang Terhenti" yang meliputi 166 kontrak yang menjadi penyokong utama Fast

Track Program I (FTP I) 10.000MW terungkap bahwa pencapaian FTP I 10.000MW belum memenuhi target yang telah ditetapkan serta masih banyak mengalami kendala.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari saat membuka Pertemuan Koordinasi "Pembangunan Ketenagalistrikan di Indonesia, Masalah dan Solusi dalam Implementasi Program 35.000 MW dan Transmisi 46.000 KM". "Implementasi program listrik 35.000 MW dan transmisi 46.000 km menjadi perhatian BPK dalam merancang perencanaan pemeriksaan BPK," tegasnya.

Koordinasi yang diselenggarakan di Auditorium BPK, Jakarta pada Selasa (31/5) diikuti oleh auditor di lingkungan BPK serta para pemangku kepentingan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan.

Hadir sebagai narasumber yaitu Anggota IV BPK, Rizal Djali, Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, dan Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi serta dari eksternal BPK, Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, Civitas Akademika ITB, Pekik Argo Dahono.

Koordinasi yang dimoderatori oleh Effendi Ghazali ini terselenggara sebagai bentuk kepedulian BPK terhadap permasalahan di bidang ketenagalistrikan dan dalam rangka mengoptimalkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas program ketenagalistrikan nasional.

KETUA BPK LANTIK STAF AHLI BPK BIDANG KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Rabu, 18 Mei 2016, bertempat di Kantor Pusat BPK, Ketua BPK, Harry Azhar Azis melantik Barlean Suwondo yang sebelumnya menjabat Kepala Auditorat I.B dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah menggantikan Ali Al Basyah yang telah memasuki masa Pensiun. Pelantikan tersebut dihadiri para Anggota BPK serta Pejabat Eselon I dan II di lingkungan BPK.

Dalam sambutannya, Ketua BPK berharap Seorang Staf Ahli dapat aktif menawarkan kajian-kajian yang progresif dan inovatif serta mampu menjalin kerja sama dan koordinasi yang konstruktif dengan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan bidangnya.



RAT KOPERASI PEGAWAI BPK 2016



Dalam rangka untuk mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dan mengesahkan rencana kegiatan tahun 2016, Koperasi Pegawai BPK mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2016 yang dilaksanakan pada Kamis, 9 Juni 2016, di Auditorium Kantor BPK, Jakarta.

RAT Koperasi Pegawai BPK dibuka secara resmi oleh Sekjen BPK, Hendar Ristriawan selaku Penasehat Koperasi Pegawai BPK. Turut hadir Pengawas Koperasi Pegawai BPK, R. Yudi Ramdan Budiman, Ketua Koperasi Pegawai BPK, Gunarwanto, Perwakilan dari Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Jakarta Pusat, Pengurus dan Pengawas Koperasi, serta Anggota Koperasi Pegawai BPK.

Dalam RAT ini diharapkan anggota koperasi dapat mengevaluasi kinerja yang disampaikan oleh Pengurus dan Pengawas koperasi sekaligus memberikan masukan-masukan demi perkembangan dan kemajuan Koperasi pegawai BPK.

ARE WE (THE REAL) CHAMPIONS?



Tulisan ini dilatarbelakangi oleh pengalaman berharga penulis saat menghadiri seremoni pemberian penghargaan di sekolah anak. Pada seremoni tersebut, penulis merasa sedikit kecewa karena sang anak tidak menjadi murid dengan predikat terbaik (honor).

Mungkin perasaan tersebut sering dirasakan oleh kita semua, khususnya yang telah menjadi orang tua. Beberapa predikat kerap dijadikan sebagai tolak ukur kemenangan dalam kehidupan. Kemenangan tersebut

ditandai dengan piagam atau tanda penghargaan yang seakan menjadi stigma dan standar nilai tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah memang demikian adanya?

Sepertinya memang tidak sepenuhnya demikian.... mari kita coba lihat dari sisi lain. Pencapaian tolak ukur yang ditandai dengan perolehan piagam atau tanda penghargaan tersebut sesungguhnya merupakan sebagian kecil dari kemenangan kehidupan. Kemenangan sesungguhnya tidak hanya diwujudkan dalam bentuk penghargaan atas prestasi yang diraih tetapi juga pelajaran yang dapat kita petik dari setiap proses menuju penghargaan tersebut. Hal berharga ini secara tidak sadar seringkali kita lupakan.

Melanjutkan pengalaman di atas, ketika penulis mencoba melakukan penggalian dan perenungan singkat, penulis justru memperoleh kemenangan-kemenangan lain yang bernilai lebih dibanding sekadar piagam atau tanda penghargaan. Hasil penggalian penulis mendapati bahwa sang anak memperoleh banyak pujian dari beberapa guru kelas. Guru kelas banyak memuji bagaimana keterampilan anak dalam mengkoordinasikan kegiatan presentasi kelas sehingga kelas tersebut dapat menjadi juara bahkan mengalahkan kelas lain yang lebih senior. Guru kelas memuji kuatnya leadership skill (kepemimpinan) dalam diri sang anak yang sayangnya tidak diwujudkan dalam bentuk piagam atau tanda penghargaan. Testimoni lain juga diperoleh dari para orang tua murid, yang menyatakan bahwa sang anak memiliki sifat suka menolong dan empati terhadap lingkungan serta berbagai "prestasi lainnya" yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Prestasi-prestasi tersebut tentunya belum dapat dihitung sebagai tolak ukur kemenangan yang ada saat itu.

Mengapa belum dapat dihitung? Apakah karena tidak adanya seremoni untuk hal ini? Apakah karena prestasi tersebut tidak memperoleh piagam atau tanda penghargaan lantas tidak layak disebut sebagai kemenangan? Hal ini perlu menjadi perenungan bagi kita bersama.

Sebagai umat muslim, sebentar lagi kita akan menyongsong hari raya Idul Fitri 1437 H, yang merupakan hari kemenangan setelah sebulan penuh melakukan ibadah puasa. Pasti banyak nilai-nilai luhur dalam kehidupan yang telah kita raih selama sebulan penuh berpuasa. Semoga semuanya itu menjadikan kita semua sebagai *The Real Champions*. Pemenang sejati dalam amalan dan pemenang sejati dalam kehidupan.

Selamat hari Raya Idul Fitri 1437 H, mohon maaf lahir dan bathin.

NEWS KOREK PERS

KPPU Gandeng BPK Libas Tender Curang
(Koran Tempo, 25/5/2016)

KPPU menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPK untuk memberantas persaingan usaha yang tidak sehat. Pemberantasan dilakukan terutama terhadap tender yang diadakan pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara. Menurut Ketua BPK, Harry Azhar Azis, selama ini banyak tender yang diadakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak fair atau diduga ada kecurangan.

BPK Sebut 17 Proyek Jembatan Bermasalah
(Indopos, 28/5/2016)

Pemkab Kolaka Timur harus lebih hati-hati lagi mengelola keuangan daerahnya. Sebuah kabar tak sedap muncul dari BPK yang menyebut adanya 17 proyek jembatan bermasalah di Koltim TA 2014. Berdasarkan hasil audit, proyek-proyek itu ketahuan merugikan Negara. BPK pun merekomendasikan agar kerugian negara itu dikembalikan.

4 Kementerian/Lembaga Disorot
(Pikiran Rakyat, 7/6/2016)

BPK menyampaikan predikat Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer kepada empat kementerian/ lembaga, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan pemerintah Pusat (LHP-LKPP) 2015. Presiden Joko Widodo pun membacakan empat K/L itu agar diingat sebagai catatan perbaikan pada tahun berikutnya, yakni Kementerian Sosial, Kemenpora, Komnas HAM, dan TVRI.

CASCISCUS

- Warta : Apa kabar Ti, baru datang ya? Tumben pagi banget datang ke kantor.
- Warti : Eh Warta, iya nih Ta, soalnya takut kejabak macet, apalagi mau deket-deket lebaran gini Ta, jalanan pada macet semua, makanya datang agak pagi biar gak kejabak macet Ta.
- Warta : Oh gitu, Ti, iya nih beberapa hari ini memang jalan di Jakarta macet banget Ti, ya harus sabar aja sih Ti, hihhih buat nambah pahala karena sabar dengan macetnya kota Jakarta tercinta ini.
- Warti : Hahaha, iya Ta, pahala karena melawan macet bukan melawan nafsu.
- Warta : Hahaha iya, oh ya nanti kalo lebaran kamu mau mudik kemana Ti, ke kampung halaman suamimu di Palembang atau ke Kampung halamanmu di Semarang Ti?
- Warti : Iya nih Ta, aku juga bingung Ta, maunya sih kedua-duanya. Aku sih rencananya hari pertama sampai hari ketiga lebaran di Palembang, terus hari ke empat sampai ke enam di Semarang. Cuma ada kendala sedikit ini Ta.
- Warta : Loh ada apa emangnya Ti? Kehabisan tiket ya Ti?
- Warti : Bukan kehabisan Tiket Ta, kalo tiket mah gampang nyarinya, yah kalo tiket pesawat habis kan masih ada kereta api, kalo tiket kereta api habis kan masih ada Bus. Kalo masalah transportasi mah gampang Ta, banyak alternatif lain. Kalo masalahku ini signifikan banget Ta.
- Warta : Ya terus apa dong Ti yang jadi kendalamu itu?
- Warti : Ini loh Ta, masalah biaya hihhihi, tabunganku terkuras nih Ta, soalnya kemarin ada kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga Ta. Makanya sedih aku Ta, masa mudik ga bawa apa-apa Ta.
- Warta : Oo masalah biaya, tenang Ti. Kan lebaran ada di awal bulan, jadi lumayan lah ada gaji buat beli sesuatu untuk dibawa mudik. Terus ada Gaji ke 13 juga Ti, di tambah lagi sekarang kan PNS dapet THR loh Ti, jadi aman lah kalo mau mudik Ti.
- Warti : Hah kamu bisa aja, mana adalah PNS tuh dapet THR kamu bercanda aja sih Ta.
- Warta : Bener Wartu, itu mah infonya udah melang buana tau, kemarin kan Kementerian PANRB menyampaikan bahwa Tahun 2016 ini Pegawai Negeri Sipil mendapatkan tambahan selain dari Gaji ke 13 yaitu Tunjangan Hari Raya dimana besarnya satu bulan gaji pokok Ti.
- Warti : Alhamdulillah, Okedeh kalo gitu aku tinggal dulu ya Ta. (sambil berlari kecil).
- Warta : Loh mau kemana Ti? Masa abis aku kasih info langsung mau pergi gitu aja Ti.
- Warti : Aku mau cek saldo dulu nih Ta, siapa tau THR sama gaji ke 13 sudah masuk (HAHAHAHA).
- Warta : Aduuhh kamu ini Ti, aku kira ada apa. (geleng-geleng kepala)
- Warti : Namanya juga ibu - ibu Ta, dimaklum ya hehehe.

»» KABAR SELINTAS

SERAHKAN LHP KEPADA 19 K/L, BPK BERHARAP TINDAK LANJUT SEGERA DILAKUKAN



Tugas BPK tidak berhenti setelah LHP diserahkan kepada entitas, tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Hal itu diungkapkan Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna pada penyerahan LHP BPK di Auditorium Pusdiklat BPK, Jakarta, Kamis (2/6).

“Komitmen entitas untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini laporan keuangannya, tapi yang tidak kalah penting adalah komitmennya untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK,” tegas Anggota BPK.

Pada penyerahan LHP atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2015 pada 19 Kementerian/Lembaga di lingkungan pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara I tersebut, Anggota BPK yang didampingi oleh Auditor Utama Keuangan I BPK, Heru Kresna Reza, menyebutkan terdapat 32 jenis temuan signifikan yang penting untuk menjadi perhatian.

Temuan tersebut diantaranya yaitu, terdapat penerimaan yang digunakan langsung untuk membiayai kegiatan di luar mekanisme APBN dan akumulasi pelaksanaan pekerjaan belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir 2015 menjadi 708 kegiatan atau bertambah 54 kegiatan dari tahun 2014.

Selain itu, mekanisme penyusunan LBMN dalam rangka mendukung penyajian neraca dalam LK belum memadai juga penyajian realisasi belanja modal tidak mencerminkan keadaan fisik yang sebenarnya, terjadi kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal, serta terdapat realisasi belanja barang dan jasa fiktif.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar

Pandjaitan mengatakan dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual, tantangan yang dihadapi oleh K/L adalah kesiapan SDM. Oleh karena itu, Menkopolkam sangat mengharapkan kerja sama dari BPK agar dapat lebih memaksimalkan K/L dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.

Selain Menkopolkam, hadir pada penyerahan LHP itu diantaranya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, Ketua KPK, Agus Rahardjo, dan Kepala Pimpinan Lembaga lainnya, serta Pejabat dan Pemeriksa di lingkungan AKN I BPK.

PENYERAHAN LHP ATAS LK PEMPROV DKI JAKARTA TAHUN 2015

Rabu, 1 Juni 2016 bertempat di Gedung DPRD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam sidang Paripurna Istimewa BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada LHP atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2015. Penilaian ini sama seperti laporan pada tahun sebelumnya (TA 2014).

Anggota V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang dikecualikan dalam LHP kali ini. Pertama, pengendalian pengelolaan pendapatan dan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan belum memadai.

Kedua, Pemprov DKI belum mencatat piutang lainnya yang berasal dari konversi kewajiban pengembang membangun rumah susun menjadi penyeteroran uang. Pemprov DKI Jakarta juga berkewajiban menyerahkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah kepada pengembang yang belum

menyerahkan aset berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum setelah jatuh tempo.

“Penegakan izin kepada pengembang ini belum mengatur pengukuran nilainya, sehingga penerapannya menyulitkan penghitungan secara akrual,” ucapnya.

Pengecualian ketiga, yakni pengendalian aset tetap, termasuk aset tanah dalam sengketa masih belum memadai yaitu pencatatan piutang tidak melalui siklus akuntansi dan tidak menggunakan sistem informasi akuntansi.

Dia menambahkan, secara khusus pengelolaan yang harus segera diperbaiki adalah memberikan pelatihan terhadap pengelolaan aset tetap, agar pencatatan melalui siklus akuntansi dan menggunakan sistem akuntansi yang berbasis akrual, serta menyelesaikan inventarisasi seluruh aset.

Selain itu, Pemprov DKI juga harus meningkatkan koordinasi antara SKPD selaku pengguna barang dengan BPKAD selaku pencatat barang dan menyelesaikan sengketa aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



»» RENUNGAN

“
Yang mudah adalah menilai, mengkritik, menyalahkan, dan menghujat perilaku orang lain. Yang berat adalah menerima dengan lapang hati ketika dinilai, dikritik, disalahkan, dan dihujat oleh orang lain. Adalah suatu hal yang luar biasa jika kita tidak marah atau emosional dengan kritikan dan hujatan orang lain kepada diri kita.
”



LINTAS PERWAKILAN

BPK PERWAKILAN SUMATERA UTARA GELAR MEDIA WORKSHOP

BPK Perwakilan Provinsi Sumut menggelar kegiatan *Media Workshop* Triwulan II Tahun 2016. Acara ini dihadiri oleh perwakilan media yang bertugas di wilayah Provinsi Sumut baik cetak, elektronik, maupun *online*, serta pejabat struktural dan pegawai BPK Perwakilan.

Diharapkan melalui kegiatan ini nantinya dapat tercipta hubungan kesepahaman dan kerja sama antara BPK dan media di Provinsi Sumut dalam menyebarkan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah secara jelas dan akurat kepada publik.

Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala Perwakilan, dilanjutkan paparan materi mengenai LHP atas LKPD TA 2015, Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD TA 2015, Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK per 22 Maret 2016 dan Pemantauan Kerugian Negara Semester I 2016 pada Pemprov/Kab/Kota se-Provinsi Sumut, oleh Kepala Perwakilan, V. M. Ambar Wahyuni sebagai narasumber utama.

SOSIALISASI PERADILAN SEMU UNTUK MEMBEKALI PEMERIKSA DALAM PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Ditama Binbangkum BPK, Pengadilan Negeri Gorontalo dan Kejati Gorontalo mengadakan kegiatan peradilan semu (*mootcourt*) pada (27/5), bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Gorontalo.

Kepala Perwakilan, Bingkros Hutabarat mengatakan “Dengan adanya simulasi peradilan semu ini, diharapkan para pemeriksa mendapat gambaran yang jelas mengenai praktek pemberian keterangan ahli di persidangan, hal ini diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas BPK untuk memberikan keterangan ahli.”

Acara diawali dengan pemberian materi mengenai Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli dalam Proses Persidangan oleh Kasubdit Bantuan Hukum, Herry Riyadi dan materi tentang Aspek psikologis dalam Pemberian Keterangan Ahli oleh Psikolog dari Pusdiklat BPK, Pulung Anggoro.

BELAJAR DAN BERMAIN DI PERPUSTAKAAN BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI

(Senin, 13/6) suasana Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali terlihat berbeda dari biasanya. Banyak terlihat anak-anak yang berlalu lalang di lobi utama dan Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Keramaian ini disebabkan oleh kegiatan yang digagas oleh Pengelola Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Bali. Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Bali menggelar kegiatan Belajar dan Bermain di Perpustakaan, dengan tema, “Aku Cinta Perpustakaan”.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini, diikuti oleh sekitar 40 anak-anak usia 2 hingga 10 tahun, yang merupakan putra dan putri dari pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Program ini diharapkan dapat memberikan nilai edukasi kepada anak-anak para pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Bali selain itu juga sebagai ajang silaturahmi keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Bali.

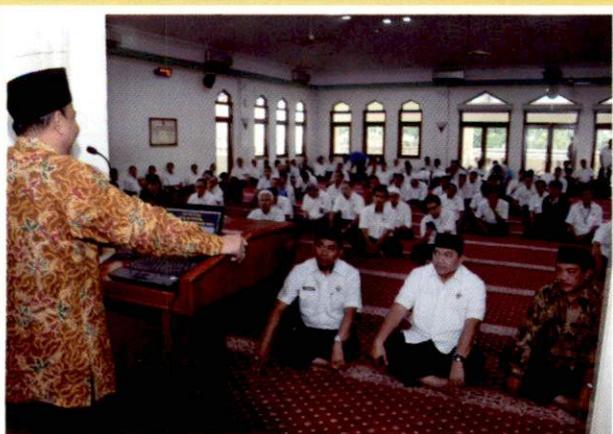
GALERI FOTO



Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi (kiri) dan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Parlansyah Harahap (kanan) saat mengalungkan kain ulos kepada Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari (tengah) usai penyerahan LHP LKPD Provinsi Sumatera Utara di kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara pada 7 Juni 2016.



Penyambutan selamat datang secara adat kepada Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar ketika berada di Palangka Raya dalam rangka kegiatan Penyerahan LHP LKPD Provinsi Kalimantan Tengah pada 12 Juni 2016.



Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari, Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi dan Inspektur Utama, Mahendro Sumardjo hadir dalam kegiatan memperingati Isra Miraj di Masjid Baitul Hasib BPK pada 30 Juni 2016.



Pemberian bantuan pendidikan murid oleh Dharma Wanita Persatuan dan Ikistra BPK kepada anak pegawai di lingkungan BPK RI di Ruang Pola, Gedung Arsip pada 2 Juni 2016.